KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Krisis Venezuela dan minyak, DPR sarankan perkuat ketahanan energi
Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Krisis Venezuela Dan Minyak

DPR Sarankan Perkuat Ketahanan Energi

ANGGOTA Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal ini menyusul krisis yang terjadi di Venezuela yang memicu gejolak internasional, khususnya di sektor energi dan minyak bumi.

Terlepas dari dinamika dan kepentingan politik global, Ratna meminta Indonesia tidak boleh abai terhadap dampak atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela. "Perkuat ketahanan energi. Apalagi motif utama dari konflik dan tekanan internasional terhadap Venezuela tidak bisa dilepaskan dari persoalan minyak," ujar Ratna di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Diketahui, Amerika Serikat membombardir Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026). Ratna berpendapat, kasus Venezuela menunjukkan energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Tapi telah menjadi instrumen geopolitik yang dapat menentukan stabilitas sebuah negara.

Insiden ini, lanjutnya, harus menjadi refleksi serius bagi Indonesia. Pertama, kekayaan energi tidak otomatis menjamin kedaulatan. Venezuela memiliki cadangan minyak besar. Tapi ketergantungan pada satu sektor energi, minimnya diversifikasi, dan lemahnya tata kelola justru membuat negara tersebut rentan terhadap tekanan eksternal.

Kedua, energi sering kali menjadi pintu masuk intervensi ekonomi dan politik. Sebab itu, Indonesia harus didorong untuk segera memastikan kebijakan energi yang tidak mudah dipengaruhi dinamika global.

Ketiga, kedaulatan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Energi tidak bisa dipandang semata hanya sebagai isu teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan nasional yang menyangkut ekonomi, sosial, dan stabilitas politik.

"Indonesia tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Kasus Venezuela harus menjadi alarm dini bahwa ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan negara," tegas politikus PKB ini.

Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini menambahkan, serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai tindakan sepihak dan mencederai prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi fondasi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia.

"Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," tegas Jazuli dalam keterangannya, Senin (4/1/2026).

Jazuli menegaskan, tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan. Apalagi Venezuela merupakan negara berdaulat, sehingga tindakan Amerika Serikat tersebut dinilai telah melampaui tata hukum internasional yang beradab.

Dengan itu, ia mengingatkan praktik semacam ini sangat berbahaya apabila dibiarkan dan diterima sebagai hal yang normal dalam hubungan internasional. Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk, seolah-olah hukum internasional tidak lagi diindahkan dan bisa dilanggar begitu saja oleh negara-negara berkuasa.

"Jika hukum internasional runtuh, maka dunia akan berada di ambang kekacauan dan ketidaktertiban global," tandas legislator asal Banten ini.

Ia menekankan, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global. Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil.

"Perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer," kata politikus PKS ini.

Jazuli menyerukan kepada PBB dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan.

"Karena perdamaian dunia hanya dapat dijaga jika semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan," pungkas Jazuli. ■ TIF